DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR

LAPORAN

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SEMESTER I (JANUARI-JUNI) TAHUN 2022

IZIN CEPAT UNTUNG
DPMPTSP KAB. KAMPAR

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang
website: dpmptsp.kampar.go.id e-mail : dpmptsp@kamparkab.go.id
Kode Pos : 28411

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR GAMBAR..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. LATAR BELAKANG 1
B. LANDASAN HUKUM..... 5
C. MAKSUD DAN TUJUAN 6
D. KERANGKA ALUR..... 6
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN..... 8
A. VISI 8
B. MISI 8
C. SASARAN 8
D. MANAJEMEN PELAYANAN..... 8
E. MOTTO PELAYANAN..... 9
F. MAKLUMAT PELAYANAN..... 9
G. STANDAR PELAYANAN 9
H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK..... 10
I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN..... 11
J. SUMBER DAYA MANUSIA..... 17
K. SARANA DAN PRASARANA 17
L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN 25
M. INOVASI 29
N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT 29
O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR 30
BAB III PENUTUP..... 32
A. KESIMPULAN 32
B. SARAN 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Mekanisme Laporan 7

Gambar 2. Logo Motto Pelayanan 9

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI 12

Tabel 2. Daftar Non Perizinan 16

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2022 19

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari-Juni) Tahun 2022 ... 20

Tabel 5. Rekapitulasi Pengaduan dan Informasi Semester I (Januari – Juni) Tahun 2022 26

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022 30

Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022 30

Tabel 8. Izin Usaha Non UMK Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022 31

Tabel 9. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester I 31

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan mekanisme penetapan jenis perizinan berusaha di Indonesia menggunakan pendekatan Berbasis Risiko. Penetapan jenis perizinan berusaha didasarkan kepada tingkat risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan sistem *Online Single Submission* (OSS) yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Dalam rangka telah bertransformasinya sistem perizinan berusaha dari *Online Single Submission* 1.1 (OSS 1.1) menjadi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA), maka sistem perizinan berusaha OSS-RBA hadir untuk lebih mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan perizinan berusaha. Dengan dilaunchingnya OSS-RBA oleh Presiden Joko Widodo pada Tanggal 09 Agustus 2021, perizinan berusaha di Indonesia sudah melaksanakan sistem perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

OSS versi RBA memuat perizinan berusaha yang dibedakan berdasarkan risiko dan skala kegiatan usaha sehingga memudahkan pelaku UMKM dengan tingkat usaha rendah untuk memiliki perizinan berusaha dengan mudah. Untuk usaha dengan tingkat risiko rendah, pelaku usaha cukup melakukan pendaftaran di sistem OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah maka perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar, sedangkan untuk kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi, perizinan berusahanya adalah NIB dan Izin.

OSS-RBA wajib digunakan oleh Pelaku Usaha, Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Pelabuhan Bebas (LKPBPB). Sistem OSS-RBA ini terpusat dan terintegrasi sehingga seluruh kegiatan usaha yang mencakup 16 sektor (Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, ESDM Ketenagahukuman, Perindustrian,

Perdagangan, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Transportasi, Kesehatan Obat dan Makanan, Pendidikan dan Kebudayaan, Pariwisata, Keagamaan, Pos Telekomunikasi, Sistem dan Transaksi Elektronik, Pertanahan dan Keamanan, dan Ketenagakerjaan) dapat melakukan permohonan izin nya melalui OSS-RBA. Pihak yang dapat melakukan permohonan perizinan berusaha pada OSS-RBA ini antara lain: pelaku usaha perseorangan, pelaku usaha badan usaha, pelaku usaha kantor perwakilan dan badan usaha luar negeri.

Dengan adanya sistem OSS-RBA ini, Pemerintah Daerah harus mempersiapkan dasar hukum dan NSPK untuk Pendelegasian Wewenang, Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur serta Maklumat Pelayanan Perizinan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.

Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi sebagaimana yang tercakup dalam Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan merupakan tugas pokok dan fungsi 2 dari (dua) bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A;
   a. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/I memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:
      a) Pemerintah Daerah
      b) Penanaman Modal, dan
      c) Kesehatan
   b. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/II memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:

a) Pertanian
b) Perkebunan
c) Komunikasi
d) Informatika dan
e) Pendidikan

c. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A/III memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:
   a) Perindustrian
   b) Perdagangan
   c) Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

2. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B
   a. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/I memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:
      a) Perhubungan
      b) Peternakan, dan
      c) Sosial
   b. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/II memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:
      a) Tenaga Kerja, dan
      b) Pertanahan
   c. Subkoordinator Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B/III memberikan pelayanan perizinan berdasarkan sektor usaha yaitu:
      a) Perikanan
      b) Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan
      c) Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, maka pendelegasian wewenang Perizinan

di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar terdiri atas:

a. Perizinan berusaha Berbasis Risiko ber KBLI (Perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI harus melalui sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat)
b. Perizinan berusaha Non KBLI (Perizinan berusaha non KBLI merupakan persayaratan/kewajiban peristiwa berusaha dalam menunjang kegiatan berusaha dalam hal ini adalah disebut PB-UMKU)
c. Perizinan non berusaha non KBLI (Perizinan non berusaha non KBLI merupakan perizinan diluar perizinan berusaha berbasis risiko)
d. Non Perizinan (dapat melalui sistem yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan/ atau Pemerintah Daerah)

Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menggunakan sistem aplikasi OSS RBA dan SICANTIK Cloud.

Pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan harus sesuai dengan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor: 503-236/I/2022 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor: SK.069/DPMPTSP-SET/98 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

Faktor penting dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), penggunaan sistem dan kemampuan (penguasaan teknologi) atau aplikasi petugas layanan, kecepatan waktu dalam pelayanan perizinan serta fasilitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan.

Untuk peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar perlu adanya Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di setiap semester guna penyediaan data perizinan, memberi informasi dan sebagai bahan evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan

Perizinan dan Non Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kampar untuk kedepannya agar menjadi lebih baik lagi.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 01 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
16. Peraturan Bupati Kampar Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
17. Keputusan Bupati Kampar Nomor: 503-236/I/2022 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
18. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar Nomor : SK.069/DPMPTSP-SET/98 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk memberikan informasi tentang perkembangan pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

2. Tujuan

Sebagai bahan evaluasi terhadap berbagai permasalahan dan perkembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan sehingga dapat diupayakan solusi (jalan keluar) untuk mengatasi permasalahan tersebut.

D. KERANGKA ALUR

Proses pelaksanaan pembuatan Laporan Perizinan dan Non Perizinan yang sudah dikeluarkan berdasarkan mekanisme sebagai berikut:

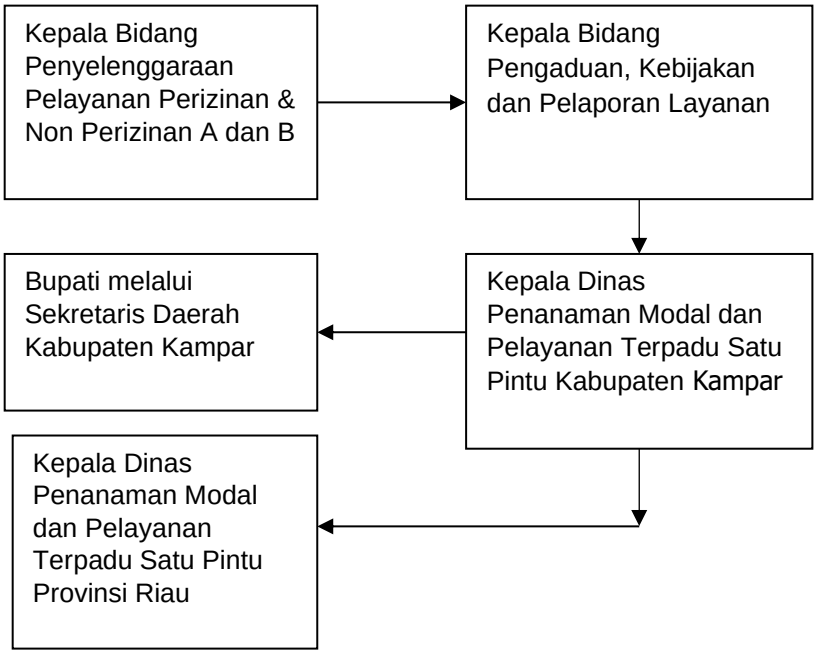

Gambar 1. Mekanisme Laporan

Keterangan:

1. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan & Non Perizinan A dan B menyampaikan laporan realisasi jumlah izin yang telah dikeluarkan kepada Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan memerintahkan Fungsional Pranata Komputer Muda untuk melakukan rekapitulasi data jumlah izin bulanan berdasarkan laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan selanjutnya menyampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar;
3. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar membuat laporan perkembangan Perizinan & Non Perizinan A dan B setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Bupati Kampar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar juga mengirimkan laporan perkembangan Perizinan & Non Perizinan A dan B setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN

A. VISI

"Prima dalam Pelayanan Investasi, Menuju Kabupaten Kampar Mandiri".

B. MISI

1. Memantapkan perekonomian daerah melalui kemudahan berinvestasi.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan.
3. Memantapkan tata kelola administrasi pemerintah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

C. SASARAN

Terwujudnya Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegrasi dan meningkatkan hak masyarakat untuk mendapatkan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan.

D. MANAJEMEN PELAYANAN

Dalam menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menerapkan Manajemen Pelayanan yang meliputi:

1. Perencanaan pelayanan;
2. Pelaksanaan pelayanan;
3. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
4. Pengawasan internal;
5. Pengelolaan informasi, penyuluhan dan pelayanan konsultasi;
6. Monitoring dan evaluasi; dan
7. Pelaporan pelayanan.

E. MOTTO PELAYANAN

Motto Pelayanan adalah “IZIN CEPAT UNTUNG” yang diharapkan penerima layanan dan pemberi layanan akan merasakan layanan yang menyenangkan.

Gambar 2. Logo Motto Pelayanan

F. MAKLUMAT PELAYANAN

1. Berjanji dan Sanggup untuk Melaksanakan Pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Memberikan Pelayanan sesuai dengan Kewajiban dan akan Melakukan Perbaikan secara Terus Menerus;
3. Bersedia untuk Menerima Sanksi, dan/atau Memberikan Kompensasi Apabila Pelayanan yang diberikan Tidak Sesuai dengan Standar Pelayanan.

G. STANDAR PELAYANAN

Standar pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Komponen Standar Pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar diantaranya:

1. Standar Pelayanan *(Service)* :
   a. Persyaratan
   b. Sistem Mekanisme, Prosedur
   c. Jangka Waktu Pelayanan
   d. Biaya Tarif
   e. Produk Pelayanan
   f. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

2. Standar Pelayanan *(Manufacturing)* :
   a. Dasar Hukum
   b. Sarana, Prasarana dan atau Fasilitas
   c. Kompetensi Pelaksana
   d. Pengawasan Internal
   e. Jumlah Pelaksana
   f. Jaminan Pelayanan
   g. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
   h. Evaluasi Kinerja Pelaksana

H. PELAYANAN SECARA ELEKTRONIK

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan menggunakan metode Pelayanan Secara Elektronik (PSE). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar melaksanakan Pelayanan Secara Elektronik (PSE) dengan 3 (tiga) system aplikasi yaitu:

1. *Online Single Submission (OSS RBA)* dengan *website: oss.go.id*
2. SICANTIK Cloud yang dapat di akses melalui *sicantikui.layanan.go.id.*
3. SIMBG dengan link *www.simbg.com* khusus untuk Persetujuan Bangunan Gedung

Pelayanan Secara Elektronik (PSE) bertujuan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang lebih mudah, cepat, tepat, efisien, transparan, dan

akuntabel. Pelaksanaan PSE dapat melalui berbagai macam Aplikasi yang sudah terintegrasi dengan lembaga terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

I. JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi seluruh Perizinan dan Non Perizinan di Bidang:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penata Ruang;
4. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan Masyarakat;
5. Sosial;
6. Tenaga Kerja;
7. Lingkungan Hidup;
8. Perhubungan;
9. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
10. Kebudayaan;
11. Kelautan dan Perikanan;
12. Pariwisata;
13. Pertanian;
14. Perdagangan;
15. Perindustrian;
16. Pemukiman; dan
17. Energi Sumberdaya Mineral.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar, pendelegasian wewenang perizinan meliputi :

1. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber-KBLI (Jenis Perizinan Berusaha dan KBLI terlampir)**
   a. Sektor Pertanian
   b. Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

c. Sektor Perindustrian (bagian 1)
d. Sektor Perindustrian (bagian 2)
e. Sektor Perdagangan
f. Sektor Transportasi
g. Sektor Kesehatan Obat Makanan
h. Sektor Pendidikan Budaya
i. Sektor Pariwisata
j. Sektor Ketenagakerjaan

2. Perizinan Berusaha Non KBLI (Jenis Perizinan Berusaha Non KBLI terlampir)

a. Sektor Pertanian
b. Sektor Perdagangan
c. Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
d. Sektor Transportasi
e. Sektor Kesehatan Obat dan Makanan

3. Perizinan Non Berusaha Non KBLI

Perizinan Non Berusaha Non KBLI berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Perizinan Non Berusaha Non KBLI

NO	Urusan	Jenis Non Berusaha Non KBLI
1	Pemerintah Daerah	Izin Reklame
2	Sektor Pertanahan	Izin Perubahan Penggunaan Tanah
3	Sektor Kesehatan	1. Izin Praktik Dokter 2. Izin Praktik Bidan 3. Izin Praktik Perawat 4. Izin Praktik Fisioterafis 5. Izin Praktik Radiografer 6. Izin Perekam Medis 7. Izin Kerja/ Praktik Tenaga Gizi 8. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi

		9. Izin Praktik Terafis Gigi dan Mulut 10. Izin Praktik Apoteker 11. Izin Praktik Penata Anastesi 12. Izin Kerja Refraksionis Optisien 13. Izin Elektromedis 14. Izin Kerja Tenaga Sanitarian 15. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik 16. Izin Tukang Gigi 17. Izin Kerja/Praktik Terapi Wicara 18. Izin Kerja Teknisi Gigi 19. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian 20. Izin Praktik Okupasi Terapis 21. Izin Praktik Psikolog Teknis 22. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional 23. Izin Praktik Kesehatan Tradisional Jamu 24. Izin Praktik Akupuntur Trapis 25. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat
4	Sektor Komunikasi dan Informatika	1. Izin Penyelenggaraan Instalasi Kabel Rumah/ Pemberian Izin Terhadap Instalatur Kabel Rumah/ Gedung (IKR/G) 2. Izin Jasa Titipan untuk Kantor Agen 3. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang cukupan Areanya Kab / Kota sepanjang tidak menggunakan Spektrum Radio 4. Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator 5. Izin Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi dalam Satu Kabupaten / Kota 6. Izin Instalasi Penangkal Petir 7. Izin Instalasi Genset

		8. Izin Lokasi Pembangunan Studio dan Stasiun Pemancar Radio dan/ atau Televisi
5	Sektor Perdagangan	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional
6	Sektor Perhubungan	1. Izin Operasi Angkutan Pariwisata 2. Izin Operasi Angkutan Lingkungan 3. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Untuk Umum 4. Izin Usaha Mendirikan Pendidikan dan Latihan Mengemudi 5. Izin Pembuatan Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau 6. Izin Insidentil 7. Izin Pool dan Agen 8. Izin Pengelolaan Terminal Penumpang Type C 9. Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan sesuai dengan Domisili Badan Usaha 10. Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Helikopter
7	Sektor Sosial	1. Izin Pengumpulan Sumbangan 2. Izin Operasional Panti Asuhan 3. Izin Operasional Organisasi Sosial 4. Izin Pengumpupan Uang dan Barang 5. Izin Undian Berhadiah
8	Sektor Pemuda dan Olah Raga	1. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata 2. Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi 3. Tanda Daftar Usaha Jasa Kawasan Pariwisata 4. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata 5. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman 6. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata

		7. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi 8. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata 9. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran 10. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata 11. Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata 12. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta 13. Tanda Daftar Usaha Spa
9	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten / Kota
10	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil	Izin Pembukaan Kantor Cab, Cab. Pembantu & Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kab / Kota
11	Pendidikan	Izin Operasional Sekolah Swasta TK, KB, PPT TPA, LKP, BKBM, SD Swasta dan SMP Swasta (baru, perpanjangan, daftar ulang)
12	Pertanian	1. Izin Praktik Dokter Hewan 2. Izin Rumah Sakit/Klinik Hewan
13	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR) 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
14	Persetujuan Lingkungan	1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) 2. Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup PKPLH) 3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH)

15	Bangunan Gedung	Persetujuan Bangunan Gedung (www.simbg.com)

4. Non Perizinan

Non Perizinan berdasarkan Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Non Perizinan

NO	Urusan	Jenis Non Perizinan
1	Sektor Kesehatan	1. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan 2. Sertifikat Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang 3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Jasa Boga 4. Sertifikat Laik Higiene Rumah Makan & Restoran
2	Sektor Sosial	1. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Karang Taruna 2. Rekomendasi Bantuan Pemberdayaan Organisasi Sosial 3. Rekomendasi Bantuan Sarana dan Prasarana Penyandang Cacat 4. Rekomendasi Bantuan Permaka dan Anak Panti dan Asrama SLB 5. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Pelatih Anak Putus Sekolah 6. Rekomendasi Bantuan Pengiriman Lanjutan Jompo Terlantar
3.	Sektor Energi dan SDA	Rekomendasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral Bukan Logam dan Batuan
4.	Kesbangpol	Surat Keterangan Penelitian

J. SUMBER DAYA MANUSIA

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar didukung oleh sumber daya manusia aparatur yang Profesional dan Kompeten di bidangnya sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Eselon III : 2 (dua) orang
2. Eselon IV : 6 (enam) orang
3. Staf PNS : 7 (tujuh) orang
4. Staf Non PNS : 20 (dua puluh) orang

K. SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan Prasarana merupakan perlengkapan yang digunakan dalam melaksanakan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, yaitu:

1. **Kantor Depan *(Front Office)*;**
   a. Loket Penerimaan
   b. Loket Penyerahan
   c. Loket Pembayaran
   d. Tempat Layanan Informasi
   e. Tempat Layanan Pengaduan dan Konsultasi
2. **Kantor Belakang**
   a. Ruang Pemrosesan
   b. Ruang Rapat
3. **Ruang Pendukung/ Fasilitas Pendukung**
   a. Ruang Tunggu
   b. Ruang Server
   c. Ruang Arsip
   d. Ruang Menyusui
   e. Ruang Bermain Anak
   f. Toilet Umum dan Disabilitas
   g. Mushalla
   h. Tempat Parkir

4. Fasilitas Lainnya

a. Seragam Pelayanan
b. Formulir
c. Telepon dan Mesin Faksimile
d. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner
e. Server
f. Mesin Antrian
g. Pengukur Kepuasan Layanan (Aplikasi di Komputer) dan Mesin Survei
h. Kotak Pengaduan
i. Kamera Pengawas (CCTV)
j. Koneksi Internet (*wifi)*
k. Laman / *website* dan *email*
l. UPS (alat penyedia daya listrik)
m. Alat pemadan kebakaran
n. Pendingin Ruangan (AC)
o. Televisi
p. Brosur/Koran/Majalah
q. Banner
r. Petunjuk Arah Lokasi
s. Pojok Gratis (Makanan dan Minuman)

Tabel 3. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Sektor pada Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022

NO	BIDANG PERIZINAN	BULAN						JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A**							
1.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/I**							
	1 SEKTOR PEMERINTAH DAERAH	74	41	66	53	30	43	**307**
	2 SEKTOR PENANAMAN MODAL	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR KESEHATAN	78	38	81	97	97	102	**493**
2.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/II**							
	1 SEKTOR PERTANIAN & PERKEBUNAN	-	-	1	-	-	-	**1**
	2 SEKTOR KOMUNIKASI & INFORMATIKA	-	-	-	-	-	1	**1**
	3 SEKTOR PENDIDIKAN	-	-	4	2	2	-	**8**
3.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A/III**							
	1 SEKTOR PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	-	-	2	7	5	3	**17**
II	**BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B**							
1.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/I**							
	1 SEKTOR PERHUBUNGAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PETERNAKAN	-	-	-	1	1	-	**2**
	3 SEKTOR SOSIAL	-	2	1	-	-	3	**6**
2.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/II**							
	1 SEKTOR TENAGA KERJA	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERTANAHAN	-	-	3	-	1	7	**11**
3.	**SUBKOORDINATOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN B/III**							
	1 SEKTOR PERIKANAN	-	-	-	-	-	-	-
	2 SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	-	-	-	-	-	-	-
	3 SEKTOR LINGKUNGAN	-	-	-	-	2	-	**2**
	JUMLAH							***848***

Tabel 4. Rekapitulasi Data Perizinan dan Non Perizinan Per-Kecamatan Se-Kabupaten Kampar pada Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022.

NO	NAMA IZIN	KECAMATAN	BULAN						JUMLAH IZIN
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN A									
I.	**SEKTOR PEMERINTAH DAERAH**								
1	IZIN REKLAME	XIII KOTO KAMPAR	1	1	1	1	1	-	
		BANGKINANG	1	1	2	-	1	1	
		BANGKINANG KOTA	9	3	11	11	3	2	
		GUNUNG SAHILAN	1	3	2	-	2	2	
		KAMPA	1	-	2	1	-	1	
		KAMPAR	2	-	1	3	2	1	
		KAMPAR KIRI	1	2	1	2	-	3	
		KAMPAR KIRI HILIR	3	1	2	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	7	2	8	-	-	
		KAMPAR UTARA	1	-	-	-	1	1	
		KOTO KAMPAR HULU	-	2	-	-	-	1	
		KUOK	1	-	4	1	-	3	
		PERHENTIAN RAJA	-	4	1	2	-	-	
		RUMBIO JAYA	1	1	1	-	-	-	
		SALO	1	1	1	3	-	-	
		SIAK HULU	14	4	12	10	11	12	
		TAMBANG	10	2	7	5	2	8	
		TAPUNG	10	8	11	3	2	6	
		TAPUNG HILIR	5	-	3	1	-	1	
		TAPUNG HULU	11	1	2	2	5	1	
	JUMLAH		**74**	**41**	**66**	**53**	**30**	**43**	**307**
II.	**SEKTOR PENANAMAN MODAL**								
III.	**SEKTOR KESEHATAN**								
2	IZIN PRAKTIK DOKTER UMUM	BANGKINANG KOTA	4	1	6	2	2	-	
		KUOK	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	1	1	-	
		KAMPA	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR	-	2	2	1	3	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	1	1	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	1	1	-	1	
		KAMPAR KIRI HILIR	2	-	-	-	1		
		PERHENTIAN RAJA	2	-	1	-	4	1	
		XIII KOTO KAMPAR	2	-	-	1	-	-	
		SIAK HULU	-	-	1	-	4	3	
		TAMBANG	-	-	2	1	2	2	
		TAPUNG	1	1	-	1	1	-	
		TAPUNG HILIR	1	-	1	-	1	1	
		TAPUNG HULU	1	-	2	2	-	-	
	JUMLAH		**14**	**4**	**18**	**11**	**19**	**8**	**74**
3	IZIN PRAKTIK DOKTER GIGI	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	1	1	
		SALO	2	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG	1	-	1	1	-	1	
		SIAK HULU	2	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	2	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**7**	**1**	**2**	**3**	**1**	**2**	**16**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	IZIN PRAKTIK DOKTER SPESIALIS	BANGKINANG KOTA	-	4	-	-	-	-	
		KAMPAR	1	-	2	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	-	-	-	-	1	-	
		PERHENTIAN RAJA	1	-	-	1	1	-	
		TAPUNG HULU	2	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**4**	**5**	**2**	**2**	**2**	**-**	**15**
5	IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	5	-	
		KAMPAR	-	-	-	-	5	-	
		KAMPA	-	-	-	-	6	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**16**	**-**	**16**
6	IZIN PRAKTIK BIDAN	XIII KOTO KAMPAR	-	-	1	-	1	-	
		BANGKINANG KOTA	2	-	3	-	1	4	
		BANGKINANG	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR	1	2	4	17	6	3	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	3	-	5	
		KAMPAR UTARA	5	-	-	3	1	2	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	2	1	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	1	-	-	-	-	1	
		KAMPA	1	-	-	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	2	3	12	6	
		KUOK	-	-	-	1	-	-	
		SALO	4	4	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	-	2	-	-	-	
		RUMBIO JAYA	-	-	-	-	1	2	
		TAPUNG	5	3	-	-	2	4	
		TAPUNG HILIR	1	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HULU	-	-	1	1	-	-	
	JUMLAH		**20**	**9**	**14**	**31**	**25**	**28**	**127**
7	IZIN PRAKTIK PERAWAT	BANGKINANG KOTA	2	1	-	6	2	5	
		KAMPAR KIRI	1	-	-	-	-	1	
		KAMPAR UTARA	-	1	-	-	-	-	
		SALO	2	3	1	1	2	1	
		KUOK	-	-	2	-	-	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	4	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	-	3	7	
		KAMPAR	8	3	10	7	4	8	
		KAMPA	-	-	1	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	2	-	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	3	
		TAMBANG	-	-	-	2	9	-	
		TAPUNG	4	-	-	1	-	2	
		TAPUNG HILIR	1	-	-	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	3	1	-	1	
	JUMLAH		**18**	**8**	**19**	**18**	**25**	**28**	**116**
8	IZIN PRAKTIK PENATA ANASTESI	PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	IZIN PRAKTIK AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	KAMPAR	-	-	1	-	-	8	
		KAMPAR KIRI	2	-	-	-	-	-	
		SALO	-	-	-	-	-	1	
		BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	1	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**2**	**-**	**3**	**1**	**-**	**10**	**16**
10	IZIN PRAKTIK APOTEKER	BANGKINANG KOTA	1	1	-	1	-	1	
		KUOK	-	-	1	-	-	1	
		KAMPAR	-	-	1	-	2	-	
		KAMPAR KIRI	1	1	1	-	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR	1	-	-	-	-	1	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	1	-	-	1	
		PERHENTIAN RAJA	1	-	1	-	-	1	
		SIAK HULU	1	1	1	1	-	1	
		TAMBANG	1	2	2	-	-	1	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	1	1	1	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	-	3	
	JUMLAH		**6**	**5**	**11**	**3**	**3**	**10**	**38**
11	IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	2	
		SALO	1	-	-	-	-	-	
		KAMPAR	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI HILIR					1	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	1	1	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	2	-	-	
		SIAK HULU	-	-	1	1	-	2	
	JUMLAH		**1**	**-**	**3**	**4**	**3**	**5**	**16**
12	IZIN KERJA / PRAKTIK TENAGA GIZI	KAMPAR	1	-	-	1	-	-	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**1**	**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**3**
13	IZIN PEREKAM MEDIS	SALO	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**
14	IZIN OPERASIONAL KLINIK	TAMBANG	-	-	1	-	-	-	
		BANGKINANG KOTA	1	-	-	-	1	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	-	-	-	-	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	1	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	-	1	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	-	1	-	-	-	
		KOTO KAMPAR HULU	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG HULU	1	1	-	-	-	-	
		TAPUNG	1	1	-	1	-	-	
	JUMLAH		**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**-**	**13**
15	IZIN APOTEK	SIAK HULU	-	1	1	1	-	-	
		KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		KUOK	-	-	-	1	-	-	
		TAMBANG	-	-	2	2	-	1	
		PERHENTIAN RAJA	-	-	-	1	-	-	
		BANGKINANG KOTA	2	-	1	1	1	1	
	JUMLAH		**2**	**2**	**4**	**6**	**1**	**2**	**17**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	IZIN PRAKTIK TERAFIS GIGI & MULUT	BANGKINANG	-	-	-	-	-	1	
		XIII KOTO KAMPAR	-	-	-	-	-	2	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**3**
17	IZIN TOKO OBAT	KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**
18	SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN	KUOK	-	-	-	-	-	2	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	-	1	
		TAMBANG	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4**	**4**
19	IZIN ELEKTROMEDIS / PERSETUJUAN IZIN PRAKTIK ELEKTROMEDIS	KAMPAR	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**
IV.	**SEKTOR PERTANIAN DAN PERKEBUNAN**								
20	IZIN USAHA PERKEBUNAN	SIAK HULU	-	-	1	-	-	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**1**	**-**	**-**	**1**	**2**
V.	**SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**								
21	IZIN GALIAN UNTUK KEPERLUAN PENGGELARAN KABEL TELKOMUNIKASI DALAM SATU KABUPATEN/KOTA	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1**	**1**
VI.	**SEKTOR PENDIDIKAN**								
22	IZIN OPERASIONAL PAUD & PNF	BANGKINANG KOTA	-	-	-	1	1	-	
		TAMBANG	-	-	-	1	-	-	
		TAPUNG	-	-	3	-	1	-	
		SIAK HULU	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**4**	**2**	**2**	**-**	**8**
VII.	**SEKTOR PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**								
23	TANDA DAFTAR GUDANG	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	-	
		SIAK HULU	-	-	1	1	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**2**	**1**	**-**	**-**	**3**
24	IZIN USAHA TOKO MODERN (IUTM)	TAPUNG	-	1	1	-	-	-	
		TAPUNG HILIR	2	-	-	-	-	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	1	-	-	-	
		KAMPAR KIRI TENGAH	-	1	-	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	1	-	-	1	
		GUNUNG SAHILAN	-	1	-	-	-	-	
		SIAK HULU	1	-	-	-	-	-	
	JUMLAH		**3**	**3**	**3**	**-**	**-**	**1**	**10**
VIII.	**SEKTOR PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG**								
25	PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) UNTUK BANGUNAN GEDUNG SELAIN PERUMAHAN	KAMPAR	-	-	-	-	1	-	
		GUNUNG SAHILAN	-	-	-	-	1	1	
		KAMPAR TIMUR	-	-	-	-	-	1	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	1	1	-	
		SIAK HULU	-	-	1	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	-	4	1	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	1	-	
		TAPUNG HULU	-	-	-	1	-	1	
		TAPUNG HILIR	-	-	-	1	-	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**2**	**7**	**5**	**3**	**17**
	JUMLAH IZIN								***827***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN B									
I.	**SEKTOR PERHUBUNGAN**								
II.	**SEKTOR PETERNAKAN**								
1	PERSETUJUAN IZIN USAHA PETERNAKAN	TAPUNG	-	-	-	1	-	-	
		SIAK HULU	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**1**	**1**	**-**	**2**
III.	**SEKTOR SOSIAL**								
2	IZIN OPERASIONAL PANTI ASUHAN	KAMPAR	-	1	-	-	-	-	
		KAMPAR UTARA	-	-	-	-	-	1	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
	JUMLAH		**-**	**1**	**1**	**-**	**-**	**2**	**4**
3	IZIN OPERASIONAL ORGANISASI SOSIAL	BANGKINANG KOTA	-	1	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**1**	**-**	**-**	**-**	**1**	**2**
IV.	**SEKTOR TENAGA KERJA**								
V.	**SEKTOR PERTANAHAN**								
4	IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA	BANGKINANG KOTA	-	-	1	-	-	1	
		BANGKINANG	-	-	-	-	1	-	
		TAPUNG	-	-	1	-	-	-	
		TAMBANG	-	-	1	-	-	5	
		SIAK HULU	-	-	-	-	-	1	
	JUMLAH		**-**	**-**	**3**	**-**	**1**	**7**	**11**
VI.	**SEKTOR PERIKANAN**								
VII.	**SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN**								
VIII.	**SEKTOR LINGKUNGAN**								
5	IZIN LINGKUNGAN	BANGKINANG KOTA	-	-	-	-	1	-	
		KAMPAR KIRI	-	-	-	-	1	-	
	JUMLAH		**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**-**	**2**
JUMLAH IZIN									***21***
TOTAL IZIN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN A & B									***848***

BANGKINANG, 30 JUNI 2022

KABID PENGADUAN, KEBIJAKAN
DAN PELAPORAN LAYANAN

ELFAUZAN, S. Hut
NIP. 19731120 199403 1 003

FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER MUDA

YESSY ANWAR, S. Si
NIP. 19800925 201001 2 003

Mengetahui,

KEPALA DINAS,

HAMBALI, SE., MH
NIP. 19681024 200003 1 002

L. PENGELOLAAN LAYANAN PENGADUAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, yang dimaksud dengan Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara. Pengelolaan pengaduan adalah kegiatan penanganan pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar menyediakan sarana dan prasarana pengaduan untuk mengelola pengaduan. Penyediaan sarana berupa informasi tentang mekanisme atau tata cara pengaduan secara langsung, tidak langsung, dan media elektronik yang mudah dipahami oleh penerima layanan. Untuk sarana dan prasarana yang disediakan adalah adalah kotak pengaduan serta loket/ruangan layanan pengaduan.

Pengelolaan Layanan Pengaduan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan cara:

1. Langsung
   Masyarakat dapat langsung mengunjungi loket atau ruangan layanan pengaduan yang sudah tersedia di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Kampar kemudian mengisi formulir pengaduan yang telah disediakan (formulir terlampir). Formulir ini memuat identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan
2. Tidak Langsung
   Pengaduan disampaikan melalui surat ataupun kotak pengaduan
3. Melalui media elektronik yaitu melalui telepon/SMS/WA ke Nomor: 0812-7646-0487 dan melalui website: *www.dpmptsp.kamparkab.go.id* & *www.lapor.go.id*

Pengaduan yang diterima dan diselesaikan di periode Semester I dari bulan Januari - Juni Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Rekapitulasi Pengaduan dan Informasi Semester I (Januari – Juni) Tahun 2022

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN					
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT	PENGADUAN INFORMASI MELALUI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	03 Januari 2022	1		Nama: Bambang Sutejo ISI: Pelapor tidak di daftrakan BPJS Ketenagakerjaan, maka dia tidak mendapatkan Pra Kerja dan belum dibayarkan Hak Pesangon oleh PT. Tenang Jaya Sejahtera Kampar.	1. Mengidentifikasi Isi Pengaduan 2. Tidak ditindaklanjuti penanganan pengaduannya karena yang diadukan bukan menjadi kewenangan DPMPTSP Kab. Kampar 3. Hal yang diadukan tidak terkait dengan perizinan berusaha dan non perizinan, maka kami mengarahkan yang bersangkutan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar 4. Balasan dari pengaduan tersebut sudah dijawab melalui email.			WEBSITE	SELESAI
2	10 Januari 2022		1			Nama: DANIL ISI: Tidak bisa login ke Web Sicantik. Apakah ada permasalahan dengan jaringan/server	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban Atas pertanyaan Via WhatsApp.	WhatsApp	SELESAI
3	03 Februari 2022		1			Nama: ADI ISI: Tidak bisa mengentry data ke Sistem OSS	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban Atas pertanyaan Via WhatsApp bahwa terdapat kendala pada Jaringan atau Sistem OSS.	WhatsApp	SELESAI
4	07 Februari 2022		1			Nama: Fetri Oktaveni ISI: Mengenai Syarat-syarat untuk Izin Pembibitan Ikan	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban Atas pertanyaan Via WhatsApp.	WhatsApp	SELESAI
5	15 Februari 2022	1		Nama: NURHAMDI ISI: PT. ZAIRA ZAMAR MANDIRI membangun tanah fasilitas umum dijadikan pembangunan rumah dan kebun kurma. Tanah tersebut biasanya dijadikan/dipergunakan untuk bermain anak-anak, acara orang dewasa dan sholat hari raya.	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Tim dari DPMPTSP pada tanggal 15 Februari 2022 turun langsung ke lokasi yaitu Perumahan YLZ untuk melihat bangunan teersebut. 3. Pihak DPMPTSP menghubungi pelapor yang bernama Bapak Nurhamdi yang merupakan salah seorang warga yang tinggal di perumahan YLZ Bangkinang 4. aduan beliau soal adanya pembangunan perumahan di Fasilitas Umum YLZ Bangkinang. 5. Setelah Tim DPMPTSP mencari data yang berkaitan dengan perizinan-perizinan dan master plannya, maka diperoleh informasi bahwa diperoleh informasi bahwa pemilik Perumahan YLZ tidak membangun di Fasilitas Umum Perumahan 6. Pihak DPMPTSP telah berkoordinasi kembali kepada Bapak Nurhamdi mengenai hal tersebut.			WhatsApp	SELESAI

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN					
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT	PENGADUAN INFORMASI MELALUI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	17 Februari 2022	1		Nama: RUL SIKUMBANG (PERS) ISI: Konfirmasi terkait perumahan Patin Cluster yang belum memiliki izin	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. aduan berkaitan dengan IMB perumahan yang belum ada : Patin Cluster, Desa Tarai Bangun Kec. Tambang. 3. Tim DPMPTSP melakukan turun lapangan/ lokasi Patin Cluster untuk memastikan soal pengaduan yang terkait dengan IMB tersebut. 4. sesampainya di lokasi, Tim juga bersama Satpol PP, Aparat Desa, RT, RW dan perwakilan perumahan 5. pada saat dilokasi, kami melakukan koordinasi dengan pihak Desa, bahwa pihak perumahan Patin Cluster memang belum mengurus rekomnya 6. oleh karena itu kami mengambil langkah untuk menempelkan stiker "IMB" pada hari jumaatnya, Tanggal 18 Februari 2022, sabtu pada tanggal 19 Februari 2022 stiker yang ditempel oleh DPMPTSP Kampar tersebut sudah dicabut. 7. Pada tanggal 21 Februari 2022 Tim DPMPTSP diperintahkan lagi untuk ke lokasi untuk memastikan soal stiker yang sudah di copot. 8. sesampainya di lokasi ternyata stikernya memang sudah di copot, Tim mencoba bertanya kepada pihak peruamhan. mereka mengakui tidak tau kenapa stiker tersebut copot, mungkin terkena angin katanya. 9. Tim menempelkan lagi stiker tersebut sebanyak 6 stiker di dinding perumahan dan meminta pihak perumahan tidak melakukan aktivitas dulu untuk sementara waktu. 10. Pada Tanggal 22 Februari 2022, akhirnya pemilik perumahan ini datang kekantor untuk menemui Kabid dan meminta maaf serta akan segera mengurus izin Perumahan "Patin Cluster"			WhatsApp	SELESAI
7	23 Februari 2022	1		Nama: KANTOR HUKUM JUDA RIANTO TOBING & PARTNERS ISI: Somasi/teguran Hukum ke dua PT AGRO ABADI II	1. Hingga saat ini pengacaranya sudah tidak pernah datang lagi untuk mendiskusikan persoalan ini 2. Pelapor sudah mundur dan tidak menlanjutkan laporannya, karena mereka sudah pernah kalah dan menjalani hukuman dan tidak bisa lagi mengajukan dengan objek yang sama tentunya itu bertentangan dengan hukum.			Surat	SELESAI
8	15 Maret 2022	1		Nama: PT. PLN ISI: PAPAN REKLAME BERPOTENSI BAHAYA LISTRIK UMUM				Surat	TIDAK PERLU TINDAK LANJUTI
9	22 Maret 2022		1			Nama: ANGGI ISI: Pengurusan IPPT untuk Perumahan apakah bisa secara Online	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp	WhatsApp	SELESAI
10	25 Maret 2022		1			Nama: YULIZAR ISI: Prosedur Upgrade IMB	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp	WhatsApp	SELESAI

NO	BULAN TANGGAL	JUMLAH		PERIHAL/URAIAN					
		PENGADUAN	INFORMASI	PENGADUAN	TINDAK LANJUT	INFORMASI	TINDAK LANJUT	PENGADUAN INFORMASI MELALUI	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	08 April 2022		1			Nama: ADE SURYA ISI: Pada Tahun 2020 membeli 1 unit rumah di Perumahan Patin Cluster oleh pak Ade, Hingga saat ini belum di bangun oleh Pihak Developer Patin Cluster. Dan menanyakan apakah perumahan tersebut telah mempunyai	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp	WhatsApp	SELESAI
12	30 Mei 2022		1			Nama: SYOFIAN ISI: Permohonan atau prosedur pada OSS untuk Izin Operasional Yayasan	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp	WhatsApp	SELESAI
13	09 Juni 2022	1		Nama: ASMANI ISI: Aapakah Izin Perumahan Green Gaza Al hadi sudah ada ? Dan sering banjir.	1. Mengindentifikasi Isi Pengaduan. 2. Telah diberikan Jawaban mengenai hal tersebut melalui pesan WhatsApp. 3. Perumahan tersebut telah memiliki Izin. 4. Mengenai banjir yang sering terjadi sebaiknya langsung melaporkan hal tersebut ke pemilik perumahan.			WhatsApp	SELESAI
14	16 Juni 2022	1		Nama: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar ISI: tentang Keterangan Rancangan Kabupaten	1. Keterangan dari Kepala Desa Tarai Bangun Bapak ANDRA MAISTARI, S.Sos 2. Perumahan Asoka (PT. Wijaya Properti Nusantara sudah mengurus Izin mulai dari Tingkat Desa, Camat dan sedang dalam proses izinnya. 3. semua berkas dokumen terlampir. 4. Begitu juga Ruko 4 Pintu pemilik a.n Sarli. 5. Tim DPMPTSP turun ke lokasi yaitu perumahan Asoka dan Ruko. 6. Jumlah Perumahan Sebanyak 50 unit. 7. sedangkan Ruko sebanyak 4 unit.			Surat	SELESAI
15	22 Juni 2022	1		Nama: JIMMI PANJAITAN, S. Pd ISI: Laporan dugaan suap penerbitan IMB-SMP SMA Sekolah Advent.	1. Telah disurati kepada Pihak Yayasan dan Pelapor dengan Nomor Surat : 700/DPMPTSP-PKPL/325 Tanggal 11 Juli 2022 tentang Undangan Mediasi yang akan di lakukan pada hari Selasa Tanggal 12 Juli 2022 namun mereka belum berkesempatan Hadir. 2. Pada Tanggal 14 Juli 2022 pihak DPMPTSP Kab. Kampar Kembali menyurati Untuk Mediasi dalam rangka penyelesaian permasalahan pengaduan saudar Jimmi. 3. Pada Tanggal 18 Juli 2022 telah dilaksanakan Mediasi di Aula kantor DPMPTSP Kab.Kampar untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan kekeluargaan. 4. Penyelesaian diminta dengan batas waktu sampai Hàri Kamis tanggal 21 Juli 2022. 5. Apabila Penerima Izin tidak dapat memperlihatkan dokumen keaslian izin yang diberikan, maka Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat ditinjau ulang Kembali.			Surat	MASIH PROSES
16	30 Juni 2022		1			Nama: BOBBY SISWANDA ISI: Tentang Pengurusan Tour & Travel (Jasa Sewa Mobil)	1. Bapak Bobby datang ke DPMPTSP dan langsung berkonsultasi mengenai hal tersebut. 2. Telah di berikan	Langsung	SELESAI

M. INOVASI

Inovasi dalam artian Inovasi Pelayanan Publik merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Kampar mempunyai 6 (enam) jenis inovasi dalam pelayanan perizinan dan non perizinan antara lain:

1. Kojou IKM;
   Kuesioner jemput data oleh petugas perizinan untuk mendapatkan **I**ndek **K**epuasan **M**asyarakat dalam Wilayah Kabupaten Kampar.
2. Layout UMKM;
   Layanan berbantuan **O**SS **U**n**t**uk pelaku **UMKM**.
3. Mambolo;
   Inovasi Pelayanan Perizinan Prioritas MAMBOLO OSS pada pelaku usaha (**M**embenahi **A**ktifitas Perizinan **M**andiri **B**erusaha melalui **O**SS).
4. Paibo;
   Penyediaan medi**a I**nformasi **B**anner **O**SS Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi Secara Elektronik.
5. Sadar;
   Penyajian buku **S**t**a**tistik **Da**ta Pe**r**izinan dan Nonperizinan Kabupaten Kampar.
6. Tracking Perizinan Online;
   Pelayanan pelayanan perizinan Tracking Perizinan Online bagi pelaku usaha yang melakukan pengurusan perizinan.

N. SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, menjadi pedoman untuk mengukur Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Dalam Survei Kepuasan Masyarakat telah dilakukan Survei Internal terhadap masyarakat yang respondennya di ambil secara acak dengan Blanko Quisioner terlampir.

Dari survei kepuasan masyarakat dari bulan Januari - Juni 2022 terdapat jumlah 645 orang dengan jumlah responden yaitu:

- Laki-laki 248 orang
- Perempuan 397 orang

Maka diperoleh Nilai IKM dari (Januari – Juni) Tahun 2022 adalah **87,07** dengan kategori **Baik**.

Tabel 6. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022

NO	BULAN	NILAI SKM	KATEGORI
1	2	3	4
1	Januari	84,26	Baik
2	Februari	87,00	Baik
3	Maret	87,09	Baik
4	April	87,14	Baik
5	Mei	87,94	Baik
6	Juni	87,83	Baik
IKM Januari – Juni		***87,07***	***Baik***

O. DASHBOARD OSS BERBASIS RISIKO KABUPATEN KAMPAR

Berdasarkan data dari *website* https://nswi.bkpm.go.id/ untuk periode Semester I (Januari-Juni) Tahun 2022 diperoleh data sesuai tabel di bawah ini yang tersebar pada 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir) :

1) Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)

Tabel 7. Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	450
2	Februari	402
3	Maret	388

4	April	222
5	Mei	194
6	Juni	418
Jumlah		***2074***

2) Izin Usaha Non UMK

Tabel 8. Izin Usaha Non UMK Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB
1	2	3
1	Januari	6
2	Februari	3
3	Maret	1
4	April	1
5	Mei	1
6	Juni	1
Jumlah		***13***

Berdasarkan Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kabupaten Kampar periode Januari – Juni Tahun 2022 di peroleh data sesuai tabel dibawah ini yang tersebar di 21 Kecamatan di Kabupaten Kampar (data terlampir):

Tabel 9. Dasboard OSS-Berbasis Risiko Kab. Kampar Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah NIB	Sebaran Proyek Berdasarkan Risiko
1	2	3	
1	Januari	456	980
2	Februari	405	765
3	Maret	389	919
4	April	223	733
5	Mei	195	454
6	Juni	419	948
Jumlah		***2087***	***4799***

BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Perizinan, disebutkan bahwa perizinan berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menetukan jenis perizinan berusaha. Untuk perizinan berusaha berbasis risiko ber-KBLI dan perizinan berusaha non KBLI diproses melalui sistem OSS dan untuk Perizinan Non Berusaha Non KBLI dan Non Perizinan diproses melalui aplikasi SICANTIK.

Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dapat disampaikan beberapa kendala dan beberapa hal-hal lain terkait perizinan diantaranya :

1. Masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap OSS RBA terutama dalam hal penginputan data untuk kategori UMK dan NON UMK
2. Pemilihan KBLI (Klasifikasi baku Lapangan Usaha Indonesia) oleh pelaku usaha yang tidak tepat sehingga berpengaruh pada tingkat risiko usaha yang di jalankan
3. Aplikasi SICANTIK belum terintegrasi ke Dinas Teknis terkait sehingga untuk mendapat rekomendasi teknis, pelaku usaha masih mengurus rekomendasi secara manual;
4. Masih adanya pemohon yang tidak menindaklanjuti dengan cepat untuk kelengkapan kekurangan persyaratan perizinan (lengkap dan benar) termasuk rekomendasi dari dinas teknis terkait.
5. Perizinan berusaha Adanya *maintenance* pada aplikasi SICANTIK dan OSS RBA dari pusat dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.
6. Jumlah Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar dengan aplikasi SICANTIK Cloud di Semester I (Januari – Juni) Tahun 2022 berjumlah **848** dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan A yaitu **827** Izin.
b. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan B yaitu **21** Izin.

7. Jumlah NIB yang diterbitkan untuk Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK) dan Izin Usaha Non UMK selama periode Januari – Juni 2022 adalah **2.087**
8. Untuk pelayanan pengaduan terdapat 16 (enam belas) kasus dari bulan (Januari - Juni) Tahun 2022 dengan keterangan kasus penanganan selesai.
9. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) untuk bulan (Januari – Juni) Tahun 2022 yaitu **87,07** masih dengan kategori **Baik**. Hal ini perlu ditingkatkan untuk pencapaian dengan kategori Sangat Baik dalam peningkatan penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha.

Berdasarkan data perizinan Semester I (Januari - Juni) Tahun 2022 dibandingkan Semester II (Juli - Desember) Tahun 2021, Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Kabupaten Kampar mengalami penurunan ± 45,57%. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap system perizinan yang baru yaitu OSS RBA. Pelaku usaha masih banyak yang belum melakukan migrasi data. Selain itu pada perizinan mendirikan bangunan yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), pelaku usaha terkendala di sistem SIMBG, karena sistem ini mempersyaratkan detail bangunan dan konsultan bangunan yang harus memiliki sertifikat keahlian.

B. SARAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Unit pelayanan harus tetap mengacu pada standar pelayanan yang merupakan jaminan dan kepastian baik bagi penyelenggara dalam memberikan maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan.
2. Perlu dilakukan nya sosialisasi kepada masyarakat/pelaku usaha terkait peraturan ataupun kebijakan baru.
3. Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat, dan pihak terkait terhadap standar pelayanan.

4. Sosialisasi dan implementasi kepada pelaku usaha terhadap sistem perizinan yang baru yaitu OSS RBA dan SIM BG.
5. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dapat ditingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan cara izin dipermudah dan pengawasan diperketat artinya evaluasi dan pengawasan internal secara berkala dan terus menerus harus dilakukan.
6. Penyelenggaraan perizinan berusaha harus tepat, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif dan efisien.
7. Penyelenggara pelayanan perizinan mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.
8. Informasi yang diberikan kepada pelaku usaha harus benar dan tepat.

Bangkinang Kota, 30 Juni 2022

KEPALA DINAS,

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

HAMBALI, SE., MH
Pembina Utama Muda
NIP. 19681024 200003 1 002

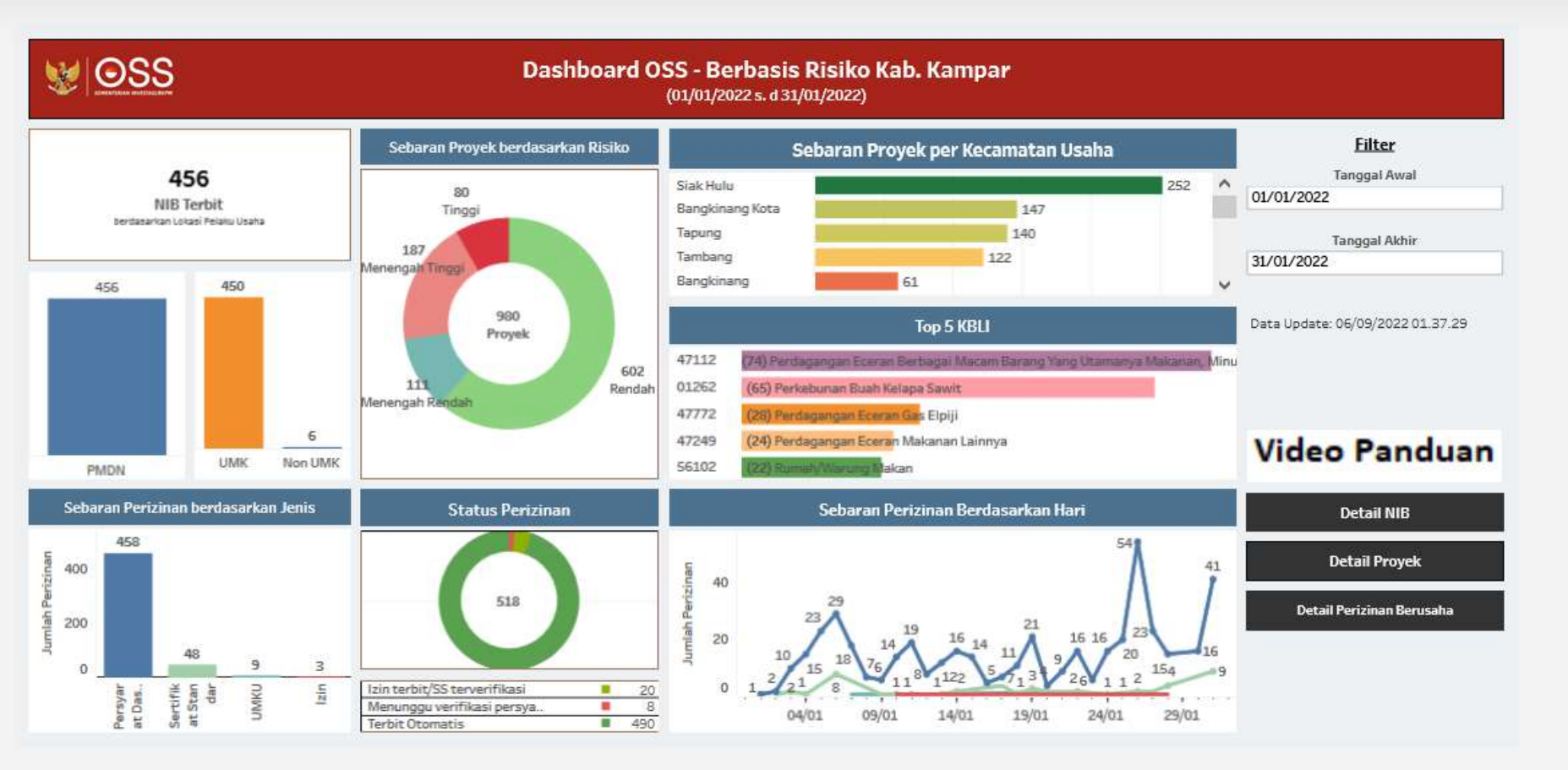
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/01/2022 s. d 31/01/2022)
456
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
456
450
6
PMDN
UMK
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
80
Tinggi
187
Menengah Tinggi
980
Proyek
111
Menengah Rendah
602
Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Siak Hulu 252
Bangkinang Kota 147
Tapung 140
Tambang 122
Bangkinang 61
Top 5 KBLI
47112 (74) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minu
01262 (65) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
47772 (28) Perdagangan Eceran Gas Elpiji
47249 (24) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
56102 (22) Rumah/Warung Makan
Filter
Tanggal Awal
01/01/2022
Tanggal Akhir
31/01/2022
Data Update: 06/09/2022 01.37.29
Video Panduan
Detail NIB
Detail Proyek
Detail Perizinan Berusaha
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
458
48
9
3
Persyarat Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
518
Izin terbit/SS terverifikasi 20
Menunggu verifikasi persya.. 8
Terbit Otomatis 490
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
04/01
09/01
14/01
19/01
24/01
29/01

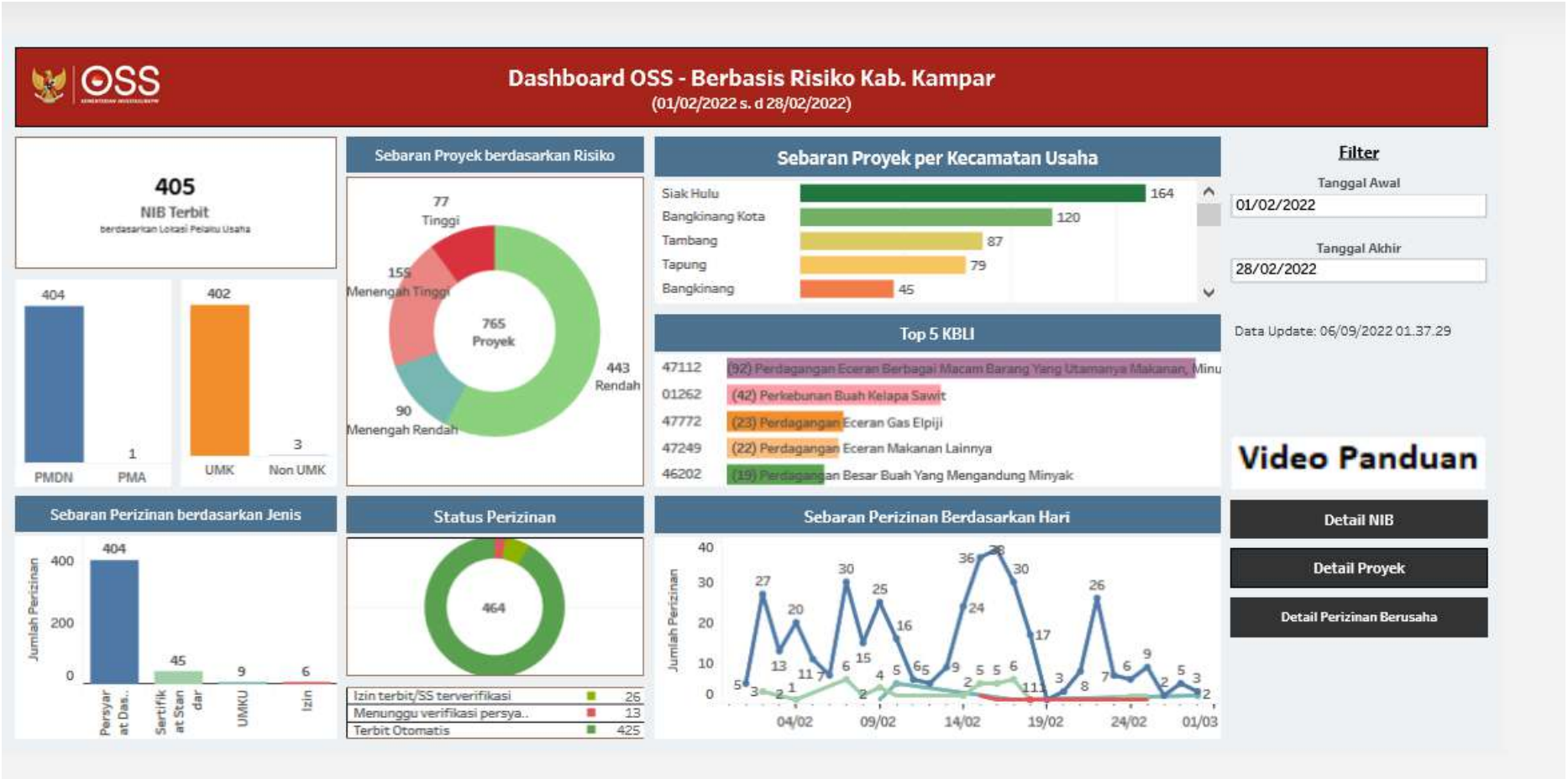
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/02/2022 s. d 28/02/2022)
405
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
404
1
PMDN
PMA
402
3
UMK
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
77
Tinggi
159
Menengah Tinggi
765
Proyek
443
Rendah
90
Menengah Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Siak Hulu 164
Bangkinang Kota 120
Tambang 87
Tapung 79
Bangkinang 45
Top 5 KBLI
47112 (92) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minu
01262 (42) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
47772 (23) Perdagangan Eceran Gas Elpiji
47249 (22) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
46202 (19) Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
Filter
Tanggal Awal
01/02/2022
Tanggal Akhir
28/02/2022
Data Update: 06/09/2022 01.37.29
Video Panduan
Detail NIB
Detail Proyek
Detail Perizinan Berusaha
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
404
45
9
6
Persyarat Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
464
Izin terbit/SS terverifikasi 26
Menunggu verifikasi persya.. 13
Terbit Otomatis 425
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
04/02
09/02
14/02
19/02
24/02
01/03

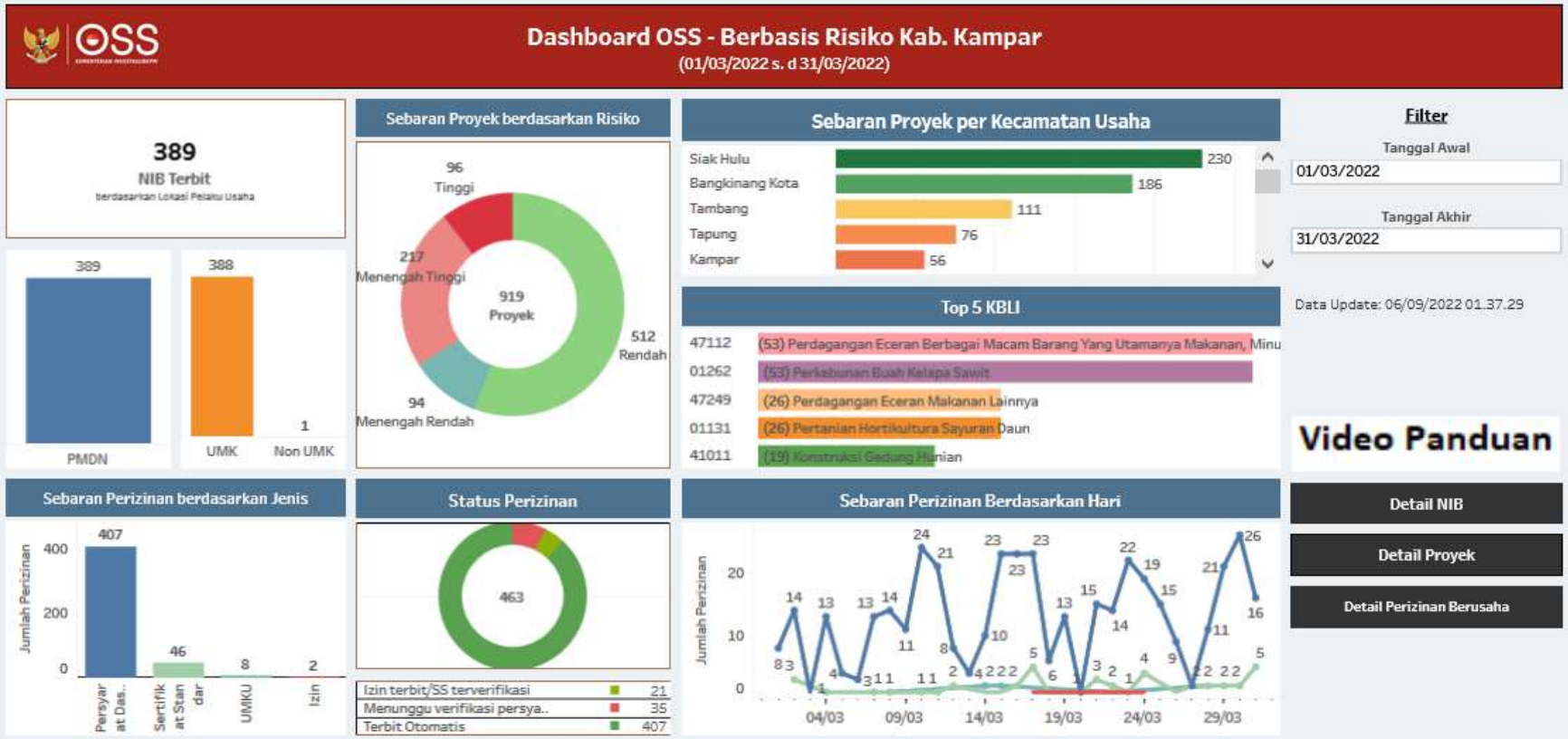
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/03/2022 s. d 31/03/2022)
389
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
389
PMDN
388
UMK
1
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
96
Tinggi
217
Menengah Tinggi
919
Proyek
512
Rendah
94
Menengah Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Siak Hulu 230
Bangkinang Kota 186
Tambang 111
Tapung 76
Kampar 56
Top 5 KBLI
47112 (53) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minu
01262 (53) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
47249 (26) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
01131 (26) Pertanian Hortikultura Sayuran Daun
41011 (19) Konstruksi Gedung Hunian
Filter
Tanggal Awal
01/03/2022
Tanggal Akhir
31/03/2022
Data Update: 06/09/2022 01.37.29
Video Panduan
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
400
200
0
407
46
8
2
Persyarat Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
463
Izin terbit/SS terverifikasi 21
Menunggu verifikasi persya.. 35
Terbit Otomatis 407
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
20
10
0
04/03
09/03
14/03
19/03
24/03
29/03
Detail NIB
Detail Proyek
Detail Perizinan Berusaha

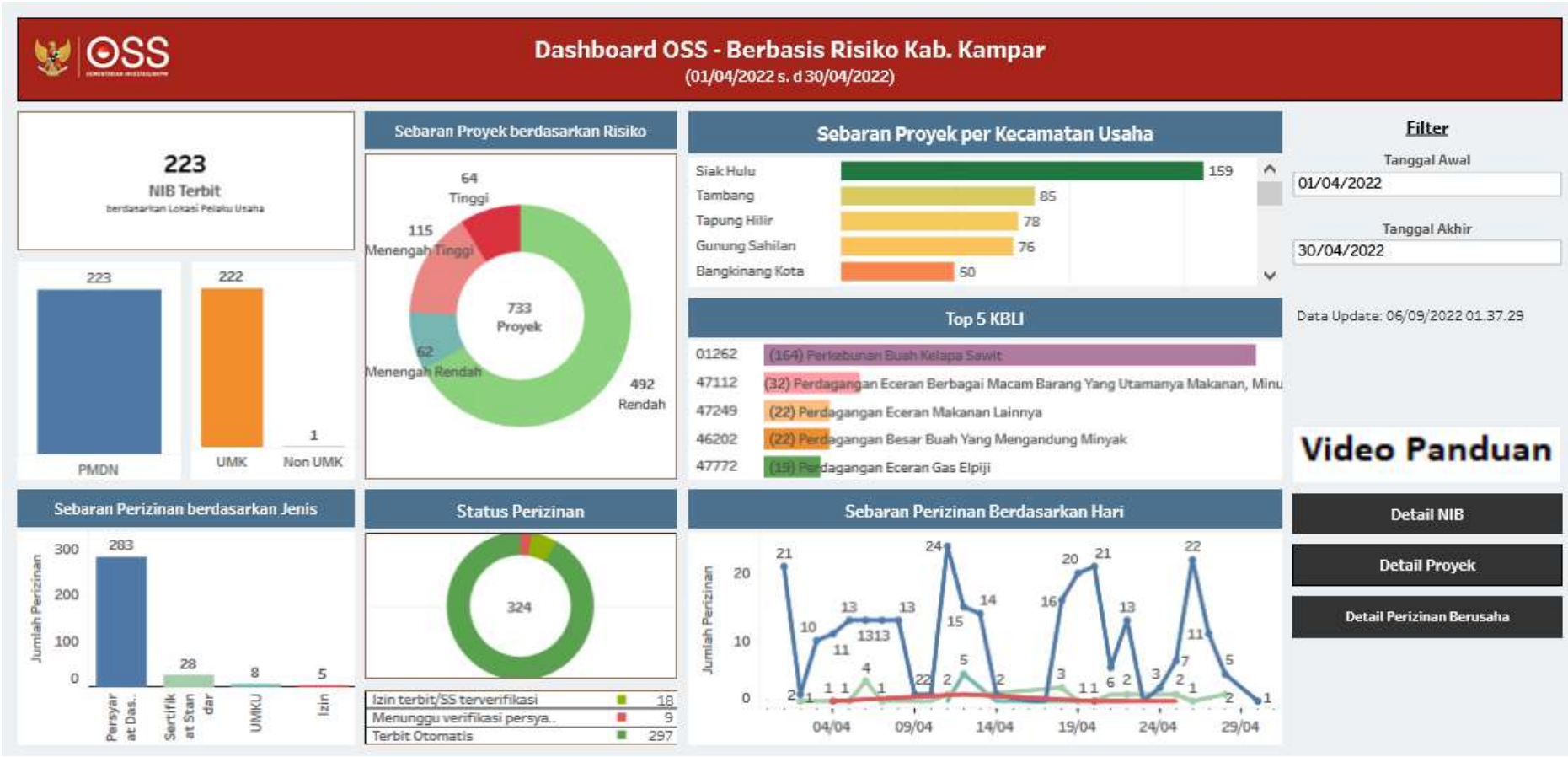
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/04/2022 s. d 30/04/2022)
223
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
223
PMDN
222
UMK
1
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
64
Tinggi
115
Menengah Tinggi
733
Proyek
62
Menengah Rendah
492
Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Siak Hulu 159
Tambang 85
Tapung Hilir 78
Gunung Sahilan 76
Bangkinang Kota 50
Top 5 KBLI
01262 (164) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
47112 (32) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Minu
47249 (22) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
46202 (22) Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
47772 (19) Perdagangan Eceran Gas Elpiji
Filter
Tanggal Awal
01/04/2022
Tanggal Akhir
30/04/2022
Data Update: 06/09/2022 01.37.29
Video Panduan
Detail NIB
Detail Proyek
Detail Perizinan Berusaha
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
300
200
100
0
283
28
8
5
Persyarat Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
324
Izin terbit/SS terverifikasi 18
Menunggu verifikasi persya.. 9
Terbit Otomatis 297
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
20
10
0
04/04
09/04
14/04
19/04
24/04
29/04

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/05/2022 s. d 31/05/2022)

195
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

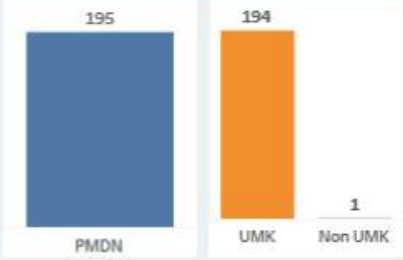

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

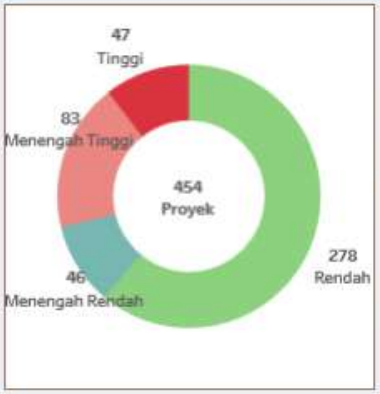

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

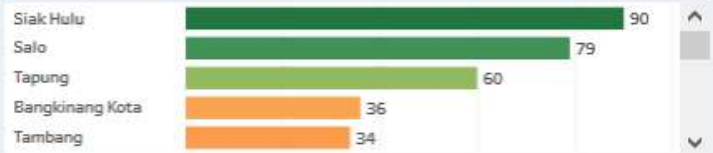

Top 5 KBLI

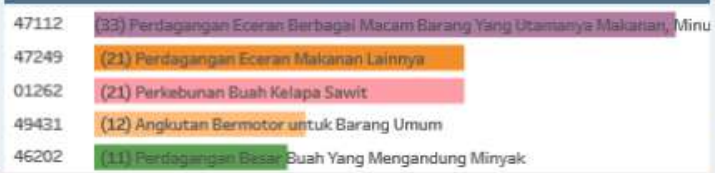

Filter

Tanggal Awal
01/05/2022

Tanggal Akhir
31/05/2022

Data Update: 06/09/2022 01.37.29

Video Panduan

Detail NIB

Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

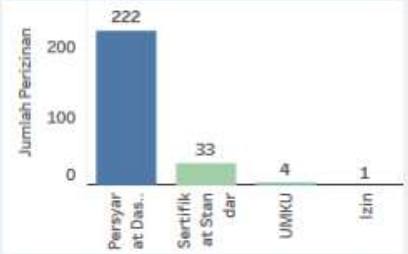

Status Perizinan

Izin terbit/SS terverifikasi	9
Menunggu verifikasi persya..	15
Terbit Otomatis	236

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

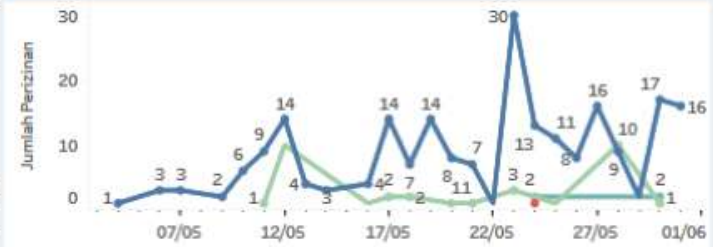

Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar

(01/06/2022 s. d 30/06/2022)

419
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha

Sebaran Proyek berdasarkan Risiko

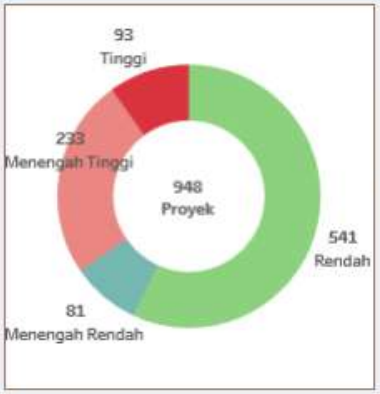

Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha

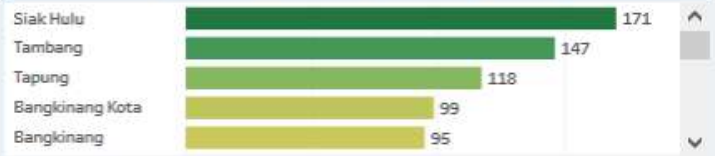

Top 5 KBLI

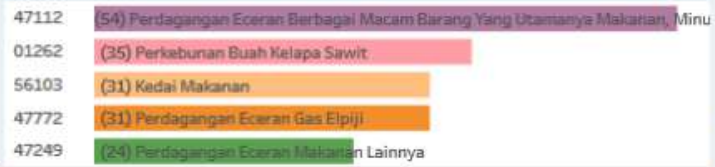

Filter

Tanggal Awal
01/06/2022

Tanggal Akhir
30/06/2022

Data Update: 06/09/2022 01.37.29

Video Panduan

Detail NIB

Detail Proyek

Detail Perizinan Berusaha

Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis

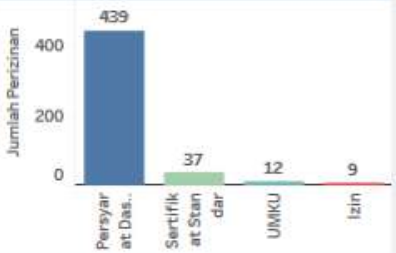

Status Perizinan

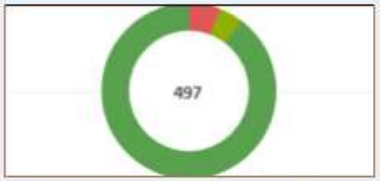

Izin terbit/SS terverifikasi	22
Menunggu verifikasi persya..	30
Terbit Otomatis	445

Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari

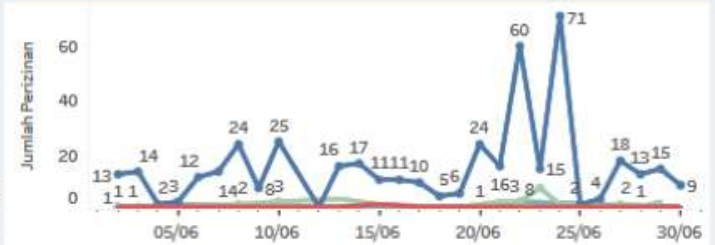

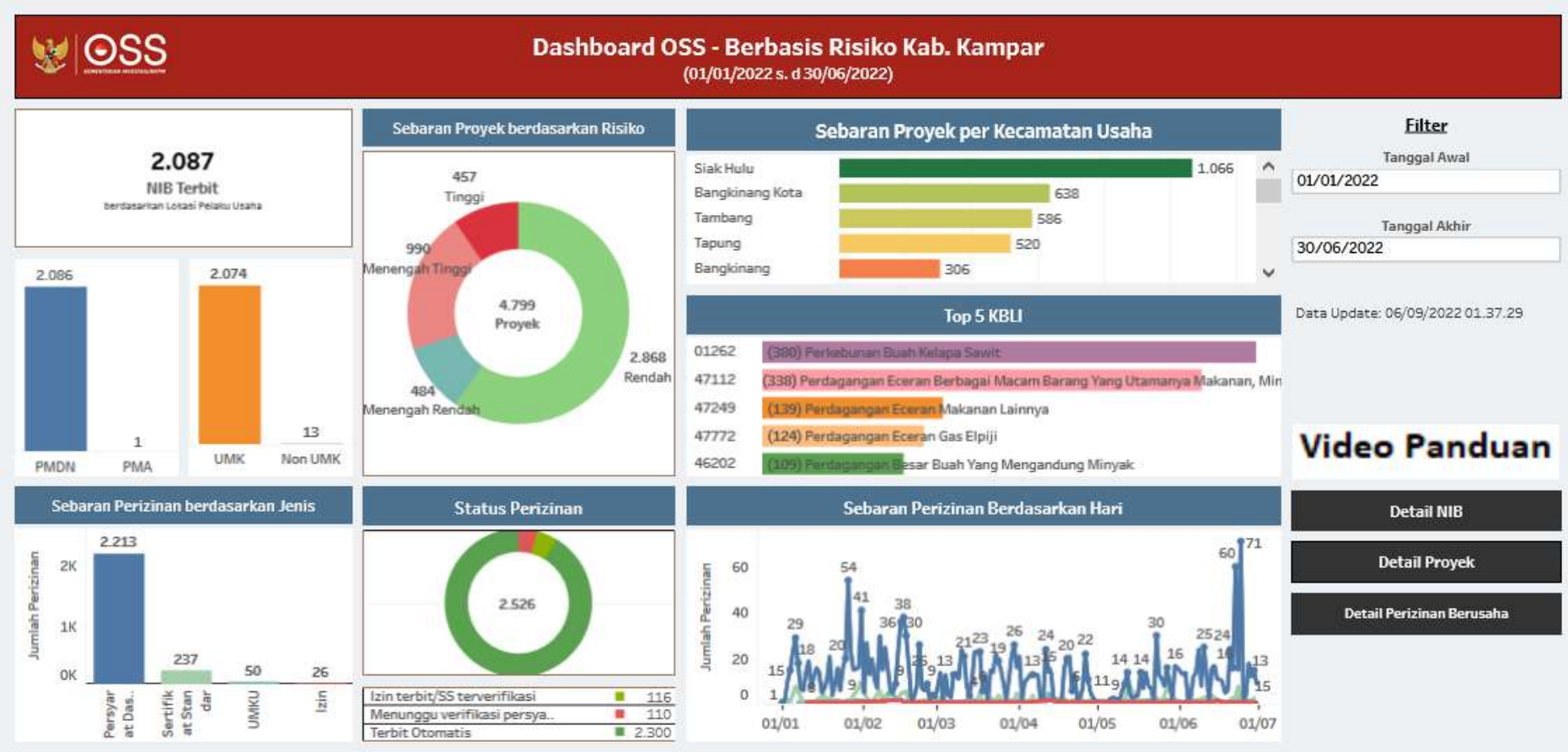
OSS
Dashboard OSS - Berbasis Risiko Kab. Kampar
(01/01/2022 s. d 30/06/2022)
2.087
NIB Terbit
berdasarkan Lokasi Pelaku Usaha
2.086
1
PMDN
PMA
2.074
13
UMK
Non UMK
Sebaran Proyek berdasarkan Risiko
457
Tinggi
990
Menengah Tinggi
4.799
Proyek
484
Menengah Rendah
2.868
Rendah
Sebaran Proyek per Kecamatan Usaha
Siak Hulu 1.066
Bangkinang Kota 638
Tambang 586
Tapung 520
Bangkinang 306
Top 5 KBLI
01262 (380) Perkebunan Buah Kelapa Sawit
47112 (338) Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Yang Utamanya Makanan, Min
47249 (139) Perdagangan Eceran Makanan Lainnya
47772 (124) Perdagangan Eceran Gas Elpiji
46202 (109) Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak
Filter
Tanggal Awal
01/01/2022
Tanggal Akhir
30/06/2022
Data Update: 06/09/2022 01.37.29
Video Panduan
Detail NIB
Detail Proyek
Detail Perizinan Berusaha
Sebaran Perizinan berdasarkan Jenis
Jumlah Perizinan
2K
1K
0K
2.213
237
50
26
Persyarat Das..
Sertifikat Standar
UMKU
Izin
Status Perizinan
2.526
Izin terbit/SS terverifikasi 116
Menunggu verifikasi persya.. 110
Terbit Otomatis 2.300
Sebaran Perizinan Berdasarkan Hari
Jumlah Perizinan
60
40
20
0
01/01
01/02
01/03
01/04
01/05
01/06
01/07

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN LANGSUNG

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Yang Diadukan	:

Bangkinang, …… 2022

Yang Mengadu

_____

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM PENGADUAN TIDAK LANGSUNG

NOMOR: 700/DPMPTSP-PKPL/2022/

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Yang Diadukan	:

Bangkinang, ……. 2022

Petugas

_____

PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Prof. M. Yamin, SH No. 16 Bangkinang Kota Website : dpmptsp.kampar.go.id
email : dpmptsp@kamparkab.go.id kodepos : 28412

FORM LAYANAN INFORMASI

Nama	:
Alamat	:
No.Hp/ Telp	:
Pekerjaan	:
Dari Instansi/Perusahaan /Perorangan	:
Hal Yang Ditanyakan	:

Bangkinang, …… 2022

Petugas

_____

KAMI MENGUCAPKAN TERIMKASIH ATAS KESEDIAAN ANDA DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PERIZINAN

Hari/Tanggal :

Jam Survey : ☐ 07.30-12.00 wib ☐ 13.00-16.00 wib

Loket Front Office :

Paraf Petugas HD :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN KAMPAR

Angket
Survey Kepuasan Masyarakat

Informasi dan Pengaduan dapat menghubungi :

1. Wabsite : http;//dpmptsp.kamparkab.go.id
2. Email : dpmptsp@kamparkab.go.id
3. E-Lapor : http;//www/lapor.go.id

MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA

sicantikui.layanan.go.id

dan www.oss.go.id

PENDAPAT MASYARAKAT TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

I. DATA MASYARAKAT (Responden)

(Silang kotak sesuai jawaban responden)

Nama Responden :

Umur : Tahun

Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki ☐ Perempuan

Pendidikan Terakhir : ☐ SD ☐ SMP ☐ SMA ☐ S1 ☐ S2 ☐ S3

Pekerjaan : ☐ ASN/TNI/POLRI ☐ Pegawai Swasta
☐ Wiraswasta ☐ Pelajar/Mahasiswa
☐ Lainnya (sebutkan)

Jenis Perizinan :

II. DATA PENCACAH/PENGUMPULAN DATA

Nama Petugas : Paraf Petugas :

III. Pendapat Responden Tentang Pelayanan Publik

(Silang kotak sesuai jawaban responden)

1. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
   a. Tidak sesuai c. Sesuai
   b. Kurang sesuai d. Sangat sesuai
2. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
   a. Tidak Mudah c. Mudah
   b. Kurang Mudah d. Sangat Mudah
3. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan.
   a. Tidak cepat c. Cepat
   b. Kurang cepat d. Sangat cepat
4. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan.
   a. Tidak mahal c. Murah
   b. Cukup mahal d. Gratis
5. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan.
   a. Tidak sesuai c. Sesuai
   b. Kurang sesuai d. Sangat sesuai
6. Bagaimana Pendapat Saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan.
   a. Tidak kompeten c. Kompeten
   b. Kurang kompeten d. Sangat kompeten
7. Bagaimana Pendapat Saudara perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan.
   a. Tidak sopan dan ramah c. Sopan dan ramah
   b. Kurang sopan dan ramah d. Sangat sopan dan ramah
8. Bagaimana Pemahaman Saudara tentang kwalitas sarana dan prasarana.
   a. Buruk c. Baik
   b. Cukup d. Sangat baik
9. Bagaimana Pendapat Saudara tentang penangnan pengaduan pengguna layanan.
   a. Tidak ada c. Berfungsi kurang maksimal
   b. Ada tetapi tidak berfungsi d. Dikelola dengan baik

SARAN/PENGADUAN PEMOHON

.....

.....

.....

.....

Nama :..... Tanda Tangan

Alamat :.....

No. HP :.....

_____
Nama

Setelah diisi mohon dimasukkan ke kotak pengaduan dan angket SKM

Dengan mengisi angket ini, Saudara telah membantu DPMPTSP Kab. Kampar dalam meningkatkan kualitas pelayanan Perizinan A dan Perizinan B

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR

BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

TAHUN 2022